

PROSPEK KERJASAMA ASEAN PASCA RATIFIKASI PIAGAM ASEAN

Humphrey Wangke

Abstract

Since December 15, 2008, ASEAN will no longer be run based on Bangkok Declaration but ASEAN Charter. With this change, ASEAN is not again an informal organization but has become a formal one since it has now a clear rule and it is administered as legal entity, which focus its activities on people to people relationship. Because of this, too, ASEAN wants to show its existence as an effective organization due to the reason that all of its decisions could be binding and its success in the future would be determined not only by its leaders but also its societies.

Abstrak

Sejak 15 Desember 2008, ASEAN tidak lagi beroperasi atas dasar Deklarasi Bangkok tetapi Piagam ASEAN. Dengan perubahan ini ASEAN bukan lagi organisasi yang bersifat informal tetapi berubah menjadi formal karena mempunyai aturan main yang lebih jelas (*rule-based*), serta terbentuk sebagai entitas legal (*legal entity*) serta lebih menekankan pada hubungan antarwarga (*people oriented*). Melalui perubahan ini ASEAN ingin menjadi sebuah organisasi yang efektif karena semua keputusan yang diambil akan bersifat mengikat dan di masa depan keberhasilan kerjasama ASEAN tidak lagi ditentukan oleh para pemimpinnya saja tetapi juga oleh masyarakatnya.

Kata kunci: Piagam ASEAN, *People Oriented*, *People to People Diplomacy*

Penulis adalah peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPRRI.

A. Latar Belakang

ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang beranggotakan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Thailand, Singapura dan Vietnam. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967¹ Deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya ASEAN, menyebutkan tiga alasan utama yang melatarbelakangi didirikannya organisasi regional ini, yaitu keinginan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan kebudayaan kawasan melalui program-program kerjasama, menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan dari rivalitas negara besar, menyediakan forum bagi penyelesaian perbedaan-perbedaan intra-regional.² Cara-cara ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kemakmuran tetapi juga stabilitas politik dan keamanan. Tiap-tiap negara tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan dalam negeri, tetapi juga bebas dari kekuatiran akan mendapat gangguan keamanan dari negara-negara tetangganya.

Namun sampai tahun 2008, eksistensi ASEAN belum dapat disejajarkan dengan organisasi regional lainnya, sebab pembentukan ASEAN hanya didasarkan atas konsensus. ASEAN tidak memiliki piagam konstitusi atau instrumen hukum lainnya yang menjelaskan tentang pembentukannya, struktur dasar dan fungsi dari organisasi ini. Berdirinya ASEAN dinyatakan hanya melalui Deklarasi Bangkok yang singkat yang berisi tentang tujuan, prinsip dasar, dan beberapa mekanisme. ASEAN didirikan sebagai forum konsultasi dan koordinasi di antara negara-negara sekawasan untuk meningkatkan saling pengertian dan kerjasama.³ Negara-negara anggota ASEAN lebih memilih sebuah organisasi regional yang bersifat fleksibel dan informal daripada yang formal. Akibatnya, banyak kesepakatan ataupun bentuk-bentuk on negara/pemerintahan ASEAN

¹ Pada saat didirikan, ASEAN hanya beranggota 5 negara saja yaitu, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Brunei bergabung pada tanggal Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Myanmar dan Laos pada 23 Juli 1997, dan pada 30 April 1999 Kamboja menjadi anggota ASEAN yang ke-10.

² Deklarasi Bangkok ini hanya menekankan pada kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sementara kerjasama politik dan keamanan sama sekali tidak disebutkan. Praktis selama tiga dekade terakhir ini ASEAN dikenal sebagai kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik tetapi sangat tertinggal dalam pengembangan demokrasi karena masih berkuasanya regim militer dan otokrasi di sebagian besar negara-negara ASEAN. Baca, James Luhulima, *Asia Tenggara dan Negara Luar yang Mempengaruhinya: Pendekatan Politik dan Keamanan*, PT Gramedia, 1998, hal. 38 dan seterusnya.

³ Jesus P. Estanislao, "Internal Dynamics of One Southeast Asia: Economic and Social Aspects", dalam Hadi Soesastro (ed.), *One Southeast Asia In a New Regional and International Setting*, CSIS, Jakarta, 1997, hal. 79.

menjadi tidak efektif pada tingkat implementasi sebab tidak ada sanksi yang akan dikenakan pada negara yang tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Mekanisme pengambilan keputusan yang selama ini yang didasarkan atas rumusan X-1 sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Munculnya dinamika-dinamika baru di lingkungan eksternal telah mendorong organisasi ini untuk menyesuaikan diri agar kehadirannya tetap dibutuhkan. ASEAN tidak mungkin lagi bertahan sebagai organisasi yang sifatnya informal dan longgar dalam menghadapi tantangan-tantangan dari luar kawasan yang cepat berubah dan menuntut pengambilan keputusan yang cepat. Berbagai tantangan eksternal yang kini dihadapi negara-negara ASEAN seperti globalisasi dengan segala konsekuensinya, interdependensi antar-bangsa dan inter-koneksi antar-masalah global, munculnya Cina dan India sebagai kekuatan-kekuatan baru yang menyebabkan persaingan semakin tajam khususnya di bidang ekonomi, serta munculnya ancaman keamanan yang bersifat transnasional mengharuskan ASEAN untuk berubah menjadi sebuah organisasi dengan aturan main yang lebih jelas (*rule-based*), serta terbentuk sebagai entitas legal (*legal entity*) agar ASEAN dapat berkiprah lebih leluasa di masa depan, baik di kawasan maupun di dunia internasional.⁴ Semua faktor itu ditambah dengan perlunya ASEAN menyesuaikan diri agar lebih tanggap menghadapi ancaman-ancaman maupun kesempatan-kesempatan baru, semakin memberi keyakinan bahwa cara kerja ASEAN selama ini sudah tidak memadai lagi.

Dalam konteks ASEAN kebutuhan untuk mencapai integrasi yang semakin mendalam serta urgensi menjembatani jurang pertumbuhan antara sesama negara anggota, mengharuskan ASEAN mengubah paradigma kerjasama mereka selama ini dari organisasi yang bersifat informal menjadi sebuah organisasi yang lebih formal dengan berlandaskan atas hukum, serta dari sebuah bentuk kerjasama yang hanya melibatkan para elit politik menjadi sebuah organisasi yang melibatkan masyarakat luas dalam berbagai kegiatannya. Proses transformasi ASEAN dimulai sejak KTT ASEAN ke-9 di Bali pada bulan Oktober 2003 yang melahirkan Bali Concord II. Kesepakatan ini menegaskan komitmen negara-negara ASEAN untuk membentuk sebuah Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) dengan mengidentifikasi kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya sebagai tiga pilar kerjasama di masa depan. Transformasi kerjasama ASEAN mencapai puncaknya dalam

⁴ "Masalah Kegunaan dan Masa depan ASEAN Charter", CS/S, makalah yang disajikan dihadapan Komisi I DPRRI, Jakarta, 4 Februari 2008.

KTT ASEAN di Singapura tahun 2007 ketika para pemimpin ASEAN menandatangani cetakbiru Piagam ASEAN.

Piagam ASEAN diratifikasi 15 Desember 2008 sehingga sejak tahun 2009 ASEAN tidak lagi beroperasi atas dasar Deklarasi Bangkok tetapi Piagam ASEAN.⁵ Penandatanganan dokumen ini menandai dimulainya bentuk kerjasama ASEAN yang lebih formal dan berdasarkan atas aturan main yang lebih jelas sehingga tidak lagi bertahan sebagai suatu asosiasi informal dan longgar.⁶ Melalui perubahan ini ASEAN berupaya menjadi sebuah organisasi yang efektif karena semua keputusan yang dikeluarkannya akan bersifat mengikat. Salah satu perubahan mendasar dalam Piagam ASEAN adalah organisasi tidak hanya menekankan pada hubungan antar-pemerintah saja tetapi juga hubungan antar-warga. Hal ini dapat diketahui dari Pasal (1) Piagam ASEAN yang antara lain menyebutkan "*To promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building*". Perubahan paradigma telah memberikan indikasi bahwa di masa depan keberhasilan kerjasama ASEAN tidak lagi ditentukan oleh para pemimpinnya saja tetapi juga oleh masyarakatnya. Dalam pandangan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, dengan disepakatinya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) maka ke depan "*ASEAN will be a rules-based, people oriented and more integrated entity*".⁷

Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai perbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, telah lama melakukan berbagai inisiatif dalam kerangka peningkatan hubungan dengan Singapura dan Johor. Misalnya untuk meningkatkan perdagangan, Pemprov Kepulauan Riau telah menjadikan pembangunan sarana transportasi sebagai prioritas. Di samping itu pemprov juga memberi kebebasan kepada Batam, Bintan dan Karimun untuk memajukan perdagangan wilayahnya dengan Singapura dan Malaysia dengan sistem *one stop service*. Dengan kebijakan semacam ini, masing-masing wilayah itu tidak

⁵ ASEAN dilahirkan melalui Deklarasi Bangkok tahun 1967, tetapi sejak 15 Desember 2008 operasional ASEAN tidak lagi didasarkan atas Deklarasi Bangkok tetapi Piagam ASEAN yang menjadikan ASEAN "become a formal institution whose members are legally bound, under it rules, to fulfill their obligations to one another and to the Association". Untuk lengkapnya, baca, Termsak Chalermphanupap, "Institutional Reform: One Charter, Three Communities, Many Challenges", dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Hard Choices: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia*, ISEAS Publishing, Singapura, 2009, hal. 101.

⁶ "Understanding the ASEAN Charter and the ASEAN Economic Blueprint", *AFA and Asiadhara Issue Paper*, Vol. 3, No. 1, Februari 2008, hal. 1-4.

⁷ Pokpon Lawansiri, "ASEAN: People-oriented or disoriented?", *Inquirer.net*, 29 November 2009, diakses tanggal 29 Januari 2010.

perlu lagi melalui pemerintah provinsi ketika memutuskan untuk bekerjasama dengan Singapura atau Malaysia. Kemudian untuk bidang sosial dan budaya, hubungan bersifat personal juga dilakukan antara individu-individu di Kepri dengan masyarakat di Johor atau Selangor atau wilayah Malaysia di sekitar perbatasan. Misalnya melakukan tukar menukar pemuda dengan negara tetangga dalam bentuk kesenian. Untuk pendidikan, sejauh ini Pemprov Kepulauan Riau telah bekerjasama dengan Johor membangun Universitas Raja Ali Haji di Batam yang khusus membidangi masalah maritim.

B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Dengan identitas baru sebagai organisasi yang menekankan pada hubungan antar-warga (*people oriented*), ASEAN harus merespon dan mengelola setiap keinginan masyarakatnya untuk terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan kerjasama agar eksistensi ASEAN sebagai satu-satunya organisasi regional di Asia Tenggara tetap terjaga. Keuntungan dari kerjasama antar-warga ini adalah kemungkinan adanya kontinuitas. Apabila terjadi pergantian pemerintahan di masing-masing negara, maka kerjasama semacam ini tidak akan terganggu. Di samping itu pendekatan antar-warga juga ini bisa menjembatani alih generasi di masing-masing negara. Dengan gambaran seperti itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prospek kerjasama ASEAN ke depan?

Topik ini menarik untuk diteliti sebab terkait dengan proses transformasi identitas ASEAN dari sebuah organisasi yang biasa menekankan pada hubungan antar-pemerintah (*government oriented*) menjadi hubungan antar-warga (*people oriented*). Di dalam proses transformasi ini, ASEAN harus dapat mendorong masyarakatnya untuk aktif berdialog atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan pembentukan Masyarakat ASEAN tahun 2015 seperti yang dicita-citakan dalam *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*.

Dengan permasalahan seperti itu, tulisan ini akan dibagi dalam 3 bahasan yaitu:

1. Bagaimana bentuk kerjasama ASEAN selama ini?

2. Apa urgensi Piagam bagi ASEAN?
3. Bagaimana prospek kerjasama ASEAN ke depan setelah diratifikasinya piagam ASEAN?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ASEAN dari organisasi yang bersifat *state oriented* menjadi *people oriented* seperti yang disebutkan dalam Piagam ASEAN. Karena melalui perubahan semacam ini berarti kelangsungan kerjasama tidak lagi ditentukan oleh hubungan antar-pemerintahnya tetapi pada hubungan antar-warganya.

Provinsi Kepulauan Riau sengaja dipilih sebagai obyek penelitian karena masyarakat di kawasan ini telah lama memiliki hubungan yang bersifat ekonomi maupun kebudayaan dengan masyarakat dari Singapura ataupun Johor, Malaysia, sehingga menarik untuk diketahui bagaimana hubungan antar-warga di kawasan ini ke depan setelah adanya Piagam ASEAN.

Hubungan antar-warga bisa dilakukan oleh siapa saja, baik individu maupun anggota organisasi tertentu. Keterlibatan individu-individu semacam ini bertujuan membantu pemerintah menyelesaikan masalah baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi para akademisi, peneliti atau anggota Komisi I DPR RI yang membidangi masalah-masalah keamanan dan luar negeri, yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi ASEAN.

D. Kerangka Pemikiran

Guna menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, serta untuk mencapai keberhasilan dalam kerjasama regional di bidang politik, ekonomi maupun keamanan, ASEAN biasanya mengandalkan pada pola-pola diplomasi yang bersifat *formal* maupun *informal*. Pola-pola diplomasi tersebut terdiri dari 3 jalur yaitu:⁸ *Track One* jika pembicaraan hanya melibatkan pemerintah saja; *Track II* jika pemerintah dan komunitas masyarakat bertemu secara informal

⁸ Lihat, Donald K. Emmerson, *Hard Choices: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia*, ISEAS, Singapura, 2009, hal. 14.

untuk mencari penyelesaian masalah; dan *Track Three* jika pemerintah melibatkan NGO atau civil society dalam sebuah pembicaraan yang bersifat informal.

Tulisan ini menggunakan *track two diplomacy* sebagai kerangka berpikir karena mencakup semua bentuk kegiatan tidak resmi yang dilakukan oleh individu yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun memperkuat hubungan tanpa adanya pihak ketiga.⁹ Karena bersifat tidak resmi, kegiatan yang dilakukan bisa berbentuk komunikasi verbal biasa, bisa saling pengertian atau kerjasama. Diplomasi tidak resmi dilakukan dengan asumsi bahwa kegiatan yang mereka lakukan tidak mungkin bisa dilakukan melalui jalur resmi. Berbeda dengan *Track One Diplomacy* yang pelakunya berasal dari kalangan pemerintah, atau birokrat serta bersifat formal, maka di dalam *track two diplomacy*, pelaku atau aktor yang terlibat di dalamnya berasal dari berbagai kalangan dan melakukan diplomasi itu secara perorangan daripada melalui organisasi formal dimana ia bernaung.¹⁰

Dalam konteks Asia Pasifik, Brian Job memberikan pendapatnya bahwa *track two diplomacy* mempunyai dua pengertian, yaitu:¹¹ pertama, mengacu pada "the entire of informal networking activities, unofficial channels of communication, and people to people diplomacy, across national and regional level, including official and nonhgovernmental diplomacy". Kedua, mengacu pada "a particular form of dialog activity associatedwith the promotion of cooperation and multilateral security regionalism". Hampir dua dekade diplomasi tidak resmi telah muncul sebagai sebuah fenomena yang menarik dalam hubungan antar-negara di kawasan Asia Tenggara. Munculnya diplomasi tidak resmi ini yang dimotori oleh apa yang diistilahkan sebagai "epistemic community"¹² telah turut memberi warna terhadap identitas ASEAN.

Meskipun pemahaman tentang *track two diplomacy* sangat luas karena semua kegiatan yang bersifat non-pemerintah termasuk di dalamnya, akan tetapi secara spesifik *track two diplomacy* dapat diartikan sebagai "unofficial policy dialog focused on problem solving where the participants have some form of

⁹ Dr. Louise Diamond, *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*, third edition, Kumarian Press, West Hartford, Connecticut, 1996, 38-39.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Brian Job, "Track II Diplomacy: Ideational Contribution to the Evolving Asia Security Order", dalam Muthiah Alagappa (ed), *Asia Security Order*, Stanford University Press, 2002, hal. 246-247.

¹² Ada yang mengistilahkan kelompok seperti ini sebagai "epistemic community", yaitu jaringan kerja kelompok profesional yang diakui kemampuan dan kompetensinya di bidang tertentu. Lihat Kim Beng Phar, "Asia's Informal Diplomacy: Track Two Discussion and Regionalism", *Media*, Vol. 23, No. 1, Spring 2001 dalam <http://www.harvardir.org/articles/998/>, diakses 12 Oktober 2009.

access to official policymaking circles".¹³ Pihak-pihak yang terlibat dalam *track two diplomacy* ini pada umumnya mempunyai akses terhadap para pembuat kebijakan atau pemerintah sehingga ide-ide yang berkembang dalam diskusi yang berlangsung secara informal itu dapat membantu pemerintah mengatasi masalah yang muncul. Meningkatnya aktifitas bisnis di kawasan Asia Tenggara yang diikuti dengan meningkatnya pertemuan di kalangan pengusaha telah turut membentuk proses regionalisasi kerjasama ekonomi ASEAN.¹⁴ Meskipun keterlibatan *non-state actor* seperti kalangan pengusaha, akademisi, dan LSM diakui telah turut mempercepat proses pembentukan identitas dan komunitas kawasan, akan tetapi mereka belum pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, ASEAN kini berada dalam tekanan masyarakatnya untuk membuat perubahan yang substansial di dalam modus operasinya. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan besar kemungkinan ASEAN akan kehilangan signifikansinya di tengah berkembangnya gelombang demokratisasi di kawasan.

ASEAN yang pro-rakyat dan menjadi milik masyarakat adalah pesan masa kini dan masa mendatang. Kehadiran ASEAN jangan hanya dirasakan oleh para pemimpinnya tetapi juga masyarakatnya, sehingga kehadiran ASEAN akan lebih mengakar di masyarakat. Dengan demikian, eksistensi dan kerjasama ASEAN bisa lebih diandalkan untuk menghadapi persaingan dengan organisasi regional lainnya. Untuk itu ASEAN harus menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan menciptakan peta kehidupan regional yang lebih baik, berkualitas dan bermartabat. Partisipasi seluruh warga, karenanya, merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan. Pelibatan warga dalam pembangunan masyarakat ASEAN melalui pertemuan parlemen, pemuda, wakil-wakil masyarakat sipil dan pengusaha akan menjadi titik balik penting dalam menciptakan rasa persaudaraan di kalangan rakyat ASEAN, dan mengubah aspirasi mereka menjadi sesuatu yang konkrit.

Di tengah-tengah semakin majunya kerjasama regional di berbagai kawasan, kerjasama internal ASEAN tetap harus berlanjut dengan intensitas kedekatan yang tetap terjaga. Karena itu sudah saatnya bagi ASEAN untuk lebih mengedepankan kerjasama antar-warga sebagai sebuah bentuk kerjasama yang bersifat *bottom up* karena dilakukan bukan melalui saluran pemerintah

¹³ Dalia Dassa Kaye, "Rethinking Track Two Diplomacy: The Middle East and South Asia", *Clingendael Diplomacy Papers*, No. 3, Netherland Institute of International Relations, Juni 2005.

¹⁴ Dikutip dari Alexander C. Chandra, "Indonesia's Non-States Actors in ASEAN: A New Regionalism Agenda for Southeast Asia?", *Contemporary Southeast Asia* 26, no. 1, 2004, hal. 159.

tetapi langsung oleh warga. Menghadapi berbagai ancaman dan tantangan lintas-batas yang semakin kompleks di tingkat regional, ASEAN dituntut untuk meningkatkan kerjasama berbasis *people to people* melampaui perbedaan persepsi, tradisi, latar belakang ataupun sistem nilai terkait dengan isu-isu dalam negeri masing-masing negara.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan melalui analisis data primer dan sekunder tentang upaya dan prospek ASEAN sebagai sebuah organisasi regional, yang tidak hanya menekankan pada hubungan antar-pemerintah tetapi yang terpenting adalah hubungan antar-warga. Data primer merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang dipilih secara sengaja (*purposive*). Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sifat penelitian ini deskriptif karena melukiskan atau menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama-tama dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini. Setelah memperoleh data yang diperlukan, penelitian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pejabat dari pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, pejabat pemerintahan Pemerintah Kota Batam serta Kadin Batam.

3. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 1-10 November 2009, di Provinsi Kepulauan Riau. Dipilihnya provinsi ini karena mempunyai perbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sehingga bisa dipastikan bahwa interaksi antar penduduk kedua wilayah berlangsung secara intensif baik secara ekonomi maupun sosial budaya.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kerjasama ASEAN Di tengah Munculnya Tantangan Baru

Pada saat didirikan tahun 1967, ASEAN tidak memiliki piagam atau konstitusi atau instrumen hukum lainnya yang menjelaskan tentang pembentukannya, struktur dasar dan fungsi dari organisasi ini. Negara-negara pendiri ASEAN pada saat itu lebih memilih sebuah organisasi regional yang sifatnya informal dan fleksibel sebagai forum konsultasi dan koordinasi di antara negara-negara se kawasan untuk meningkatkan saling pengertian dan kerjasama.¹⁵ Kerjasama ASEAN berjalan secara informal yang didasarkan atas konsensus atau yang dikenal dengan sebutan *ASEAN Way*.¹⁶ Cara ini menempatkan pendekatan konsultasi dan dialog sebagai prioritas dan menghindari perdebatan umum. Semua kebijakan ASEAN harus disepakati secara bulat oleh semua negara anggota. Konsekuensinya, keputusan yang diambil oleh negara-negara anggota ASEAN lebih sebagai hasil kompromi daripada sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Operasional ASEAN didasarkan atas sejumlah prinsip yang tertera dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967. Di antaranya yang terpenting adalah komitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan secara damai dan kebijakan non-intervensi terhadap setiap urusan domestik masing-masing negara.

Tidak mengherankan bila kemudian muncul suara-suara yang menyatakan bahwa struktur organisasi ASEAN sebenarnya sangat longgar.¹⁷ Implikasi dari pilihan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang bersifat fleksibel dan longgar inilah, yang sekarang mulai mendapat sorotan tajam karena terbukti menjadi sumber kelambanan kerjasama ASEAN. Konsekuensi dari dipilihnya bentuk organisasi seperti ini adalah di dalam mengambil keputusan selalu didasarkan atas konsensus, melalui tahapan konsultasi secara tuntas hingga tercapai persetujuan. Di dalam mencapai consensus, metode "10-X"

¹⁵ Jesus P. Estanislao, *op.cit*, hal. 79.

¹⁶ Untuk mengetahui lebih jauh tentang ASEAN Way, baca Gillian Goh, "The ASEAN Way: Non Intervention and ASEAN Role in Conflict Management", *Stanford Journal of East Asian Affairs*, Vol. 3, No. 1, Spring 2003, hal. 113-118.

¹⁷ Meskipun ASEAN aktif memainkan perannya di Asia Tenggara tetapi didalam konsepsi negara-negara Barat, ASEAN merupakan organisasi yang belum matang karena faktor informal tersebut. Meskipun telah membuat dan mempunyai struktur tetapi karakter dasar ASEAN adalah "*loosely connected association*

". Lihat Liao Shaolian, "ASEAN Model in International Economic Cooperation", dalam Hadi Soesastro (ed.,) *op.cit*, hal. 151.

sering digunakan sebagai model pengambilan keputusan, khususnya dalam bidang kerjasama ekonomi. Dengan metode itu berarti mayoritas negara yang mampu melaksanakan keputusan ini akan langsung melaksanakannya sementara negara yang tidak siap untuk melaksanakan keputusan itu diberi tenggang waktu untuk bergabung kemudian. Dengan cara seperti ini kerjasama ASEAN berjalan lambat.

Sebagai sebuah organisasi yang longgar, ASEAN selalu memutuskan sebuah kebijakan secara kolektif, dan mempertahankan sikap hati-hatinya dalam kerjasama regional dengan didasarkan pada partisipasi secara sukarela dari setiap negara anggotanya. Oleh sebab itu, prinsip konsensus selalu dijadikan sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, melakukan negosiasi, maupun dalam aturan diplomasi secara umum. Karena kehati-hatian ini tidak jarang prinsip konsensus inipun berjalan lambat dan bersifat sepotong-sepotong (*peacemeal approach*). Dengan karakter seperti itu, ASEAN tetap berupaya menjadi organisasi yang bersifat "*outward looking*" dengan pendekatan yang sangat hati-hati pula dalam setiap upaya kerjasama regional. Ada pendapat yang mengatakan bahwa selama hampir 40 tahun, ASEAN menjadi sebuah organisasi antar-pemerintah dengan penampilan ganda di dalam berbagai forum internasional, di satu sisi ASEAN merupakan organisasi internasional tetapi di dalam kenyataannya ia tidak menampakkan diri sebagai organisasi internasional karena keputusan yang diambil tidak pernah bulat.¹⁸

Hal demikian bisa terjadi sebab ketika didirikan ASEAN lebih banyak dilihat sebagai bentuk kerjasama untuk meningkatkan kedaulatan masing-masing anggotanya (*sovereignty enhancing*). Tetapi gagasan semacam ini sangat bersifat "*state-centric*"¹⁹ sebab ASEAN cenderung disalahgunakan oleh beberapa anggotanya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, atas nama kedaulatan nasional, mempertahankan *status quo* yang mengekang kebebasan warganya.²⁰ Myanmar, misalnya, berusaha menggunakan ASEAN sebagai tameng untuk menampik tekanan internasional terhadap kondisi dalam negeri negaranya. Bersama Vietnam dan Laos, Myanmar juga belum memberikan kebebasan kepada warganya berekspresi sehingga menjadi masalah ketika ASEAN berkeinginan memajukan HAM di kawasan Asia Tenggara.

¹⁸ Elena Ascutti, "The ASEAN Charter: An analysis", *Perspectives on Federalism*, Vol. 2, Issue 1, 2010, hal 43-45.

¹⁹ Marlene Ramirez, "ASIADHRA and ASEAN: A Case Study on the Process of Civil Society Engagement with a Regional Intergovernmental Organization", *FIM Forum 2008*, Montreal, Kanada, haf. 2.

²⁰ Lihat, Rene L. Pattiradjawane, "Membangun ASEAN Baru", *Kompas*, 15 Juni 2009.

Selama ini ASEAN mampu mempertahankan stabilitas dari berbagai gejolak politik dan ekonomi global. Tetapi kini ada ancaman keamanan dalam bentuk kejahatan transnasional dan dalam bidang ekonomi dengan munculnya Cina dan India sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia. Ancaman-ancaman ini relatif berbeda dengan yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara ketika ASEAN pertama kali dibentuk Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nuansa politik, ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya negara-negara anggota ASEAN juga mengalami perubahan. Nuansa ini juga berbeda dengan pandangan para pendiri ASEAN. Kawasan Asia Tenggara tetap menghadapi berbagai tantangan krusial yang bisa mengancam eksistensi, stabilitas dan perdamaian seperti tertuang dalam *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*.

Munculnya tantangan-tantangan baru menuntut ASEAN untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam organisasinya. Dirasakan bahwa, walaupun selama kurang lebih empat dasawarsa ASEAN telah mencapai pertumbuhan serta keberhasilan tanpa adanya suatu dasar hukum formal²¹. Selain itu walaupun cara kerja ASEAN selama itu hampir seluruhnya mengacu kepada musyawarah mufakat, mengacu kepada persuasi politik daripada penegakan juridis, akan tetapi perubahan-perubahan mendasar yang telah dan sedang terjadi baik di gelanggang internasional maupun regional, menghadapkan ASEAN pada problema-problema baru. Sementara itu, ASEAN sendiri seperti tercantum dalam *Bali Concord II*, telah memutuskan untuk tumbuh menjadi Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) dan tidak lagi bertahan sebagai suatu asosiasi informal dan longgar.

B. Urgensi Piagam ASEAN

Dengan kondisi yang ada saat ini ASEAN memerlukan penyesuaian diri agar lebih tanggap menghadapi ancaman-ancaman maupun kesempatan-kesempatan baru, timbul pemikiran bahwa kelembagaan ASEAN sudah tidak memadai lagi. Selama lebih dari 4 dekade sejak tahun 1967, ASEAN berkembang dengan kelembagaan yang sangat minimal, pusat sekretariat yang kecil dan konsensus bahwa kerjasama program dijalankan secara longgar karena tidak dilengkapi dengan mekanisme yang dapat memaksa negara anggotanya untuk

²¹ Pendirian ASEAN tahun 1967 di Bangkok hanya berdasarkan atas sebuah deklarasi sebanyak 2 lembar kertas.

patuh pada keputusan yang diambil. Dengan kondisi yang demikian, muncul kekhawatiran bahwa kerjasama ASEAN selama ini tidak akan cukup efektif untuk menggapai program-program kerja yang tergolong ambisius dalam rangka menuju integrasi ekonomi, politik dan sosial seperti yang dikehendaki dalam pembentukan Masyarakat ASEAN.

Direktur Centre for Peace and Development Studies, M. Rajaretnam, merupakan salah seorang tokoh penting yang menyatakan kekhawatirannya dengan kerjasama ASEAN saat ini. Ia antara lain mengatakan cepat atau lambat ASEAN harus mempunyai kesamaan nilai baik untuk politik maupun ekonomi agar dapat lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai pertemuan internasional.²² Ia mencontohkan Uni Eropa yang menuntut semua negara anggotanya untuk menjalankan prinsip-prinsip negara demokrasi dan pasar bebas. Menurutnya, persyaratan semacam ini penting bagi ASEAN karena negara-negara anggotanya terdiri dari negara otoriter dengan satu partai dan pemerintahan militer.²³

Gagasan tentang pembentukan Piagam ASEAN untuk menggantikan Deklarasi Bangkok pertama kali disuarakan oleh Malaysia. Keinginan untuk mengubah struktur organisasi ASEAN yang dituangkan dalam sebuah piagam diusulkan oleh Malaysia pada tahun 2004. Keputusan untuk menindaklanjuti usulan Malaysia itu terjadi pada saat berlangsung KTT ASEAN ke 11 tahun 2005 di Kuala Lumpur. Di dalam konsepnya yang berjudul '*Review of ASEAN Institutional Framework: Proposals for Change*', Malaysia antara lain menjelaskan tentang pentingnya mendorong ASEAN berkembang menjadi Masyarakat ASEAN. Agar berhasil, perubahan itu harus dilakukan secara bertahap karena terkait dengan kerangka kelembagaan. Karena itu, salah satu yang disarankan adalah dengan mengubah atau memperbaiki kelembagaan ASEAN, metode bekerja dan peraturannya. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, setelah berlangsungnya KTT, ASEAN segera membentuk *Eminent Person Group* (EPG) yang terdiri dari 10 orang mewakili 10 negara anggota ASEAN. Tugas EPG adalah memberi saran tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan negara-negara anggota sehubungan dengan rencana reorganisasi ASEAN. Perdana Menteri Malaysia Ahmad Badawi yang memimpin KTT mengatakan

²² M. Rajaretnam, "Principles in Crisis: The Need for New Directions", dalam Kao Him Hour, ed, *ASEAN's Non-Interference Policy: Principle Under Pressure*, ASEAN Academic Press, London, 2002, hal. 43.

²³ *Ibid.*

bahwa ASEAN perlu mengubah dirinya menjadi organisasi yang lebih “*people-centred community*”.²⁴

Selanjutnya, pada tahun 2006, ketika berlangsung KTT ASEAN di Cebu, Philipina, EPG mempresentasikan sebuah dokumen yang terkenal dengan nama ‘*Blueprint for an ASEAN Charter*’. Gagasan terpenting EPG adalah ASEAN harus mempunyai sebuah Piagam yang berisi tentang peraturan-peraturan, pernyataan kedaulatan, hak dan kewajiban, serta mempunyai akses terhadap proses legislasi, eksekutif dan yudisial dalam upaya untuk mempercepat proses integrasi. Setelah melalui perdebatan yang panjang, Piagam itu disetujui dan diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN dan mulai berlaku pada 15 Desember 2008. Akan tetapi di dalam pembahasannya, beberapa prinsip penting ASEAN seperti non intervensi dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara masih dipertahankan. Diplomasi ASEAN yang didasarkan atas dialog dan konsensus juga masih dipertahankan.

Pada tanggal 15 Desember 2008, ASEAN meresmikan berlakunya Piagam ASEAN, menggantikan Deklarasi Bangkok. Sebuah era baru telah dimulai. Piagam ASEAN yang terdiri dari 13 bab dan 55 pasal serta 4 annex, sebagai bagian dari perubahan itu, telah mencantumkan nilai baru didalam piagam tersebut untuk menjawab tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar. Melalui Piagam ini, faktor kelembagaan yang selama ini menjadi penghambat kemajuan²⁵, diperbarui dengan ditetapkannya ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional yang berdasarkan hukum (*ruled based*) dan sebagai entitas legal (*legal personality*) dengan struktur kelembagaan yang lebih jelas dan efisien.²⁶ Dengan struktur baru tersebut, maka ASEAN diharapkan akan lebih mampu menghadapi ancaman-ancaman internal maupun eksternal²⁷, apalagi diperkuat dengan kesepakatan membentuk komunitas (annex 1) sehingga ASEAN akan lebih kohesif dalam menghadapi setiap persoalan. Penetapan tahun 2015 bagi terbentuknya Komunitas ASEAN dimaksudkan agar tersedia waktu yang cukup bagi masing-masing negara anggota untuk secepatnya menyelesaikan persoalan domestiknya. Khusus dalam konteks

²⁴ Mely Caballero-Anthony, “The ASEAN Charter: An Opportunity Missed or One That Cannot be Missed?”, *Southeast Asian Affairs 2008*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2008, hal. 71–72.

²⁵ Tommy Koh, “ASEAN Charter at One: A Thriving Tiger Pup”, *The Straits Times*, 9 Desember 2009.

²⁶ Ali Alatas, “Piagam ASEAN Kebutuhan Mencapai Integrasi”, *Tabloid Diplomasi*, edisi April 2008 dalam <http://tabloiddiplomasi.com/>, diakses 29 Januari 2010.

²⁷ Untuk lengkapnya, lihat, Rodolfo Severino, “Framing the ASEAN Charter: An ISEAS Perspective”, dalam Rodolfo Severino (ed.), *Framing The ASEAN Charter: An ISEAS Perspective*, ISEAS Publications, Singapura, 2005, hal. 7.

ASEAN sendiri, kebutuhan untuk mencapai integrasi yang semakin mendalam serta urgensi menjembatani jurang pertumbuhan antara sesama negara anggota ASEAN, menuntut organisasi ini melakukan perubahan melalui pembentukan Piagam.

Nilai baru terpenting yang diperkenalkan ASEAN dan kemudian menimbulkan perdebatan adalah organisasi ini bukan lagi semata-mata bersifat “*state centric*” tetapi “*people oriented*” (pasal 1). Ini berarti, di masa mendatang hubungan di antara negara-negara anggota ASEAN tidak lagi disandarkan pada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah saja tetapi juga hubungan antar-warga sebagai upaya untuk memperkuat “wajah” baru ASEAN. Masa depan ASEAN tidak lagi ditentukan oleh berbagai bentuk diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahnya saja tetapi juga oleh berbagai bentuk dialog dan pertukaran antar-warga secara aktif yang dapat memperkuat bentuk baru hubungan antar negara anggota ASEAN.

Di dalam pandangan Ong Keng Yong²⁸, ada 3 alasan mengapa ASEAN membutuhkan sebuah piagam. *Pertama*, untuk membangun Komunitas ASEAN dan pada saat yang bersamaan mempersempit jurang perbedaan hasil-hasil pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN. Dengan mempunyai Piagam, ASEAN dapat mentransformasikan dirinya ke dalam sebuah organisasi yang mempunyai aturan main yang lebih jelas (*rule-based*), serta terbentuk sebuah entitas legal (*legal entity*). *Kedua*, agar berhasil dalam membangun komunitas ASEAN, setiap negara anggota harus bekerjasama melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai ASEAN kedalam kebijakan nasionalnya serta konsisten melaksanakan setiap keputusan yang diambil dalam KTT ASEAN dan persetujuan ASEAN lainnya. *Ketiga*, pembangunan ASEAN membutuhkan kerjasama dalam pengadaan sumber daya. Piagam ASEAN dapat menjadi pertanda bahwa ASEAN memerlukan perhatian dan dukungan masyarakatnya. ASEAN harus dapat meyakinkan lebih dari 520 juta penduduknya tentang agenda dan tujuan serta bagaimana rakyat dapat mengambil keuntungan dari keberadaan ASEAN. Jika rakyat ASEAN tidak dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan ASEAN, maka dapat dipastikan bahwa ASEAN tidak akan mempunyai sumber-sumber substansial untuk memberikan hasil konkrit dalam memajukan integrasi.

²⁸ Ong Keng Yong, “What’s the Difference Between ASEAN Past and Present”, makalah yang disajikan dalam *2nd ASEAN-Asia Forum* yang diselenggarakan oleh Singapore Institute of International Affairs, Singapura, 17 April 2009, dalam <http://www.siiainline.org/?q=events/2nd-asean-and-asia-forum>, diakses 26 Mei 2010.

Lebih lanjut, menurut Ong Keng Yong "The Asean Charter will serve the organisation well in three interrelated ways, such as, formally accord Asean legal personality, establish greater institutional accountability and compliance system, and reinforce the perception of Asean as a serious regional player in the future of the Asia-Pacific region".²⁹

Dicantumkannya nilai baru seperti itu di dalam Piagam akan menjadikan ASEAN tetap menjadi sebuah organisasi regional yang berpengaruh dan eksistensinya tidak hilang ditelan jaman sebab diplomasi di kawasan Asia Tenggara tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga warganya. Bagaimanapun, ASEAN tetap harus mempertahankan relevansinya dan dijadikan sebagai kekuatan penggerak dalam kerjasama regional. ASEAN perlu beradaptasi agar mampu merespon secara efektif setiap perubahan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

ASEAN tidak dapat hanya melibatkan pemerintah jika ingin sukses dan tumbuh menjadi perhimpunan regional yang maju dan langgeng. ASEAN juga harus melibatkan kalangan bisnis, swasta, media massa, LSM dan tentunya rakyat negara-negara anggota ASEAN. Dengan melibatkan semakin banyak kalangan masyarakat di dalam setiap kegiatannya, dengan sendirinya keberadaan ASEAN. akan dirasakan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Anggota masyarakat di antara negara ASEAN akan lebih saling mengenal, mengerti, dan mendapatkan manfaat dan peluang dari kerjasama ASEAN. Suatu hal yang selama ini lebih mudah diwacanakan daripada diwujudkan. Tugas dan pekerjaan untuk mentransformasikan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang berjumlah lebih dari 520 juta jiwa menjadi sebuah komunitas yang aman dan sejahtera bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. ASEAN masih harus membuktikan bahwa kerjasama yang akan dilakukannya di masa mendatang harus melibatkan kepentingan negara dan rakyatnya.³⁰

Menyelenggarakan beratus-ratus pertemuan setiap tahun tidak akan ada maknanya jika ASEAN tidak mampu mengimplementasikannya.³¹ Tugas

²⁹ Waleed PD Mahdini, "A people-oriented Asean?", *The Brunei Times*, 22 Juni 2007, dalam http://www.bt.com.bn/opinion20071122a_people_oriented_asean.mht, di akses 1 Juni 2010.³⁰ Herman Joseph S. Kraft, "A Charter for ASEAN: Challenges and Prospects for Community Building", *Indonesia Quarterly*, Vol. 36, No. 3-4, 2008, hal. 279-283.

³¹ Pada tahun 2007, ASEAN tercatat menyelenggarakan tidak kurang dari 700 pertemuan, jumlah yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan Uni Eropa yang menyelenggarakan sampai 3500 pertemuan. Tetapi kelemahan terbesar ASEAN adalah koordinasi antara pertemuan tingkat menteri per sektor, atau antara menteri dengan pejabat seniorinya sehingga banyak keputusannya yang tidak sampai ke pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih jauh, Baca, *Termsak Chalermpananupap*, *op.cit*, hal. 117.

maha berat yang kini dipikul oleh para pemimpin generasi baru ASEAN adalah mengubah kultur yang selama ini telah tertanam erat di dalam kerjasama ASEAN yaitu menilai keberhasilan sebuah pertemuan dilihat dari kesepakatan yang telah tercapai. Padahal yang lebih penting lagi adalah implementasi kesepakatan itu dengan tempo yang secepatnya. Sebab melalui implementasi kesepakatan-kesepakatan, maka rakyat di ASEAN akan lebih mengenal dan mengetahui organisasi satu-satunya di Asia Tenggara ini. Sejauh ini banyak yang diinginkan pemerintah pusat tidak diimplementasikan oleh bawahannya. Misalnya seperti yang dialami Kadin Batam ketika ingin mengetahui data tentang *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). Kadin Batam sebenarnya telah meminta data tentang CEPT ke Departemen Perdagangan, namun setelah menunggu sekian lama data itu tidak dikirim juga, maka Kadin Batam meminta data itu ke Sekretariat ASEAN. Tetapi yang terjadi kemudian, Sekretariat ASEAN menegur Departemen Perdagangan RI agar data tersebut dikirim ke Kadin Batam.³²

Walaupun hubungan antar-pemerintah negara-negara ASEAN telah sangat maju terbukti dari seringnya pertemuan antar-pejabat tinggi negara akan tetapi kenyataannya hubungan di antara warga negara anggota ASEAN masih lemah. Kerjasama ASEAN selama ini lebih bersifat seremonial sehingga belum ada dampaknya sama sekali terhadap masyarakat luas.³³ Hubungan di antara warga negaranya masih perlu ditingkatkan lagi meskipun tentunya memerlukan waktu. Akan tetapi upaya ke arah itu harus dilakukan agar rasa memiliki terhadap ASEAN tidak hanya ada di benak para pemimpin atau elit politiknya tetapi juga sampai di tingkat akar rumput. Hubungan antar-warga negara di antara negara-negara ASEAN sejauh ini terbukti belum cukup dewasa.³⁴ Tanpa pemahaman dan respons yang simpatik dari rakyat negara anggota ASEAN maka hubungan baik dan saling pengertian di antara para pemimpin dan elit politiknya menjadi tidak ada artinya.

Kesiapan negara-negara ASEAN untuk memajukan organisasinya juga bisa dilihat dari peningkatan peran Sekretaris Jenderal ASEAN. Selama ini, yang dimaksud dengan Sekretaris Jenderal ASEAN adalah Sekretaris Jenderal

³² Wawancara dengan Nada Faza Soraya, *op. cit.*

³³ Wawancara dengan Ir. Soeripno, Kepala Bappeda Kepri, di Tanjung Pinang, 2 November 2010.

³⁴ Hal ini bisa dilihat dari aksi *sweeping* terhadap warga Malaysia yang dilakukan sekelompok orang di depan Kedutaan Malaysia di Jakarta. Aksi ini mendorong Malaysia memanggil Dubes RI untuk Malaysia Da'l Bachtiar ke Kementerian Luar Negeri Malaysia. Lihat "RI Sesalkan Aksi Sweeping", *Kompas*, 11 September 2009, hal. 9.

dari Sekretariat ASEAN.³⁵ Tetapi saat ini bersamaan dengan berlakunya Piagam ASEAN maka yang dimaksud dengan Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal ASEAN. Perubahan status Sekretaris Jenderal ini sangat penting sebab salah satu kelemahan ASEAN selama ini adalah tidak serius menjalankan komitmennya.³⁶ Banyak kesepakatan yang telah dicapai ASEAN menjadi "mentah" kembali karena banyak negara anggota yang tidak mau menjalankan komitmennya sehingga menghambat proses integrasi ASEAN. Pembentukan Masyarakat ASEAN juga menghadapi tantangan karena beberapa negara anggota ASEAN berusaha menunda pelaksanaan kawasan perdagangan bebas ASEAN untuk melindungi industri dalam negerinya.

Untuk mengatasi kelemahan seperti ini, Piagam ASEAN telah memberi tanggung jawab kepada Sekjen ASEAN untuk memonitor kepatuhan negara-negara ASEAN menjalankan komitmennya {Pasal 27 ayat (1)}. Dengan cara seperti ini akan mudah diketahui negara mana saja yang belum menjalankan kesepakatan ASEAN dan Sekjen mempunyai otoritas untuk mendorong negara tersebut menjalankan kesepakatan yang dicapai ASEAN. Jika terjadi sengketa diantara negara anggota terkait dengan realisasi komitmen, Piagam telah mengaturnya dalam bentuk mekanisme penyelesaian sengketa. Pengaturan semacam ini sangat penting untuk memberi jaminan kepada negara mitra dalam membuat persetujuan dengan ASEAN.

ASEAN telah mencapai kemajuan yang cukup berarti melalui pembentukan Piagam ASEAN. Kendati demikian tetap ada kelemahan yang harus diakui karena akan menjadi tantangan terhadap kerjasama ASEAN ke depan. Piagam secara jelas menyebutkan bahwa ASEAN akan mejadi organisasi yang *people oriented*, tetapi sayangnya tidak disebutkan bagaimana melibatkan rakyat dalam kegiatan organisasi. Pemerintah nampaknya belum mempunyai formula yang jelas bagaimana rakyat harus dilibatkan dalam pembangunan ASEAN. Melalui Piagam, ASEAN masih diarahkan menjadi organisasi yang "dari rakyat dan untuk rakyat" tetapi "oleh pemerintah".³⁷ Piagam belum

³⁵ Salah satu sumber kelambanan kerjasama ASEAN selama ini terletak pada peran Sekjen yang sangat terbatas karena hanya menjadi Sekretaris Jenderal dari sebuah Sekretariat ASEAN. Jabatan ini praktis tidak mempunyai wewenang apapun kecuali menjadi fasilitator pertemuan-pertemuan ASEAN. Lihat, Hadi Soesastro, ASEAN: Regional Economic Cooperation and Its Institutionalization, Working Paper Series, No 71, CSIS, Jakarta, 2003, hal. 6.

³⁶ Tommy Koh, "ASEAN Charter at One: A Thriving Tiger Pup", *The Straits Times*, 09 Desember 2009.

³⁷ Jusuf Wanandi, The ASEAN Summit and Indonesia's National Interest, dalam *The Jakarta Post*, 19 Maret 2009.

menyediakan mekanisme yang jelas tentang bagaimana rakyat dapat terlibat dalam proses kegiatan resmi ASEAN.

ASEAN juga dinilai masih akan menghadapi masalah dalam upaya meningkatkan hubungan antar-warga mengingat tingginya keberagaman kondisi sosial, ekonomi dan politik negara anggotanya. Keberagaman ini menyulitkan ASEAN ketika harus merumuskan aturan yang harus ditaati oleh negara yang sangat protektif terhadap kedaulatannya.³⁸ Kondisi yang demikian akan membatasi efektifitas ASEAN dan membuatnya tetap jauh dari warganya. Ketika ASEAN menyatakan dirinya sebagai organisasi yang "*people oriented*", seharusnya ASEAN mampu merumuskan dan melaksanakan keputusannya secara bersama-sama dan dapat merespon apa yang menjadi kehendak warganya. Dengan kata lain, jika ASEAN ingin mengubah citranya sebagai organisasi yang relevan untuk warganya, maka ASEAN harus dapat memenuhinya apa yang menjadi kebutuhan warganya. Untuk mencapai hal itu ASEAN tampaknya masih harus bekerja keras. ASEAN masih harus bekerja lebih baik lagi dalam menginformasikan tentang dirinya kepada warganya dan apa yang sedang dikerjakannya. Banyak anggota masyarakat yang mengetahui ASEAN hanya melalui pendidikan dan media. Karena itu, ASEAN harus lebih aktif menginformasikan tentang berbagai kegiatan yang dilakukannya baik melalui media tertulis ataupun elektronik.³⁹

C. Prospek Kerjasama ASEAN

Perkembangan baru di dalam organisasi ASEAN mendapat sambutan positif dari informan yang penulis temui di Batam. Bagi mereka⁴⁰, dijadikannya hubungan antar-warga sebagai bagian dari pengembangan kerjasama ASEAN ke depan merupakan peluang untuk memelihara dan meningkatkan hubungan yang selama ini memang telah terjalin secara aktif dengan warga dari negara tetangga. Interaksi yang terjadi terutama di sektor ekonomi dan budaya.

Dalam pandangan Ketua Kadin Batam, hubungan antar-warga merupakan perkembangan sangat penting dalam kerangka kerjasama ASEAN

³⁸ John McLean, Will ASEAN's New Charter Bring Greater Cooperation? , dalam <http://www.DevelopmentAsia.mht>, diakses 24 April 2010.

³⁹ Alexander C. Chandra, "Indonesia's Non-State Actors in ASEAN: A New Regionalism Agenda for Southeast Asia, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 26, No. 1, 2004, hal. 164-165.

⁴⁰Informan utama dalam penelitian ini adalah Yusfa Hendry, Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Nada Faza Soraya, Ketua Kadin Batam dan Ir. Soeripno, Kepala Bappeda Kepri.

sebab selama ini belum terbangun kerjasama semacam ini. Yang ada selama ini masih bersifat *top down* yaitu kerjasama yang lebih didominasi oleh peran pemerintah sementara warga lebih bersikap menunggu, mengikuti apa yang diingini oleh pemerintah. Pendekatan semacam ini hanya membuat ASEAN lebih relevan bagi dunia internasional daripada untuk rakyatnya sendiri. Tetapi dengan adanya kesempatan bagi kerjasama antar-warga, maka hubungan di antara negara-negara ASEAN akan lebih solid sebab akan terbangun rasa saling percaya di antara warga ASEAN.⁴¹

Rakyat ASEAN selama ini hanya menjadi obyek kerjasama bukan sebagai subyek kerjasama.⁴² Suatu hal yang menjadi kelemahan ASEAN sehingga berakibat tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang ASEAN.⁴³ Negara-negara anggota ASEAN justru lebih menonjolkan identitas nasional daripada identitas regional. Hal ini bisa terjadi karena Asia Tenggara hanyalah nama sebuah kawasan, bukan kesatuan ekonomi, sosial ataupun politik.⁴⁴ Bila dibandingkan dengan Uni Eropa yang didominasi oleh agama Kristen dan ekonomi yang sudah maju, ASEAN merupakan kumpulan negara yang terdiri dari banyak etnis, agama dan dengan kemampuan ekonomi yang tidak sama antara negara anggota yang satu dan lainnya.⁴⁵ Pada saat didirikan tahun 1967, para pemimpin ASEAN menyadari bahwa rakyat ASEAN belum saling mengenal satu sama lain. Karena itu, di dalam *Bangkok Declaration* terdapat klausula yang menyebutkan salah satu maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN adalah "*to promote Southeast Asian Studies*".⁴⁶ Dengan kata lain, dengan memajukan studi tentang Asia Tenggara negara-negara anggota dapat saling memahami dan memajukan kerjasama yang lebih erat.

Upaya membentuk Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 bukan hanya untuk memajukan kerjasama ekonomi, politik dan budaya tetapi yang terpenting adalah memajukan kerjasama antar-warganya. Dalam KTT ASEAN di Bali tahun 2003, komitmen membangun sebuah Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*)

⁴¹ Wawancara dengan Nada Faza Soraya, Ketua Kadin Batam, Batam, 5 November 2009.

⁴² Carolina Hernandez, sebagaimana di kutip dalam, "An ASEAN, of the People, by the People, for the People", *Report of the First ASEAN's People Assembly*, Batam, Indonesia, 24-26 November 2000, hal. 1.

⁴³ Christopher B. Robert, "The ASEAN Community: Trusting Thy Neighbour", *RSIS Commentaries*, No. 110, 22 Oktober 2007, hal. 1.

⁴⁴ Leo Suryadinata, "Toward An ASEAN Charter: Promoting an Asean Identity", dalam Rudolphi C. Severino (ed.), *Framing the ASEAN Charter: An ISEAS Perspective*, ISEAS, Singapura, 2005, hal. 42-43.

⁴⁵ Untuk mengetahui lebih detail tentang keberagaman ASEAN, baca, Donald K. Emmerson, *op. cit.*, hal. 20-22.

⁴⁶ Leo Suryanata, *op. cit.*

didasarkan atas 3 pilar yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*). Negara-negara ASEAN menginginkan agar kerjasama di antara negara-negara anggotanya dapat lebih terintegrasi dan dipercepat melalui pembentukan masyarakat ekonomi, masyarakat keamanan, dan masyarakat sosial dan budaya. Melalui pembentukan ketiga pilar ini ASEAN tidak lagi ingin mengedepankan identitas nasionalnya lagi tetapi identitas kawasan, bukan lagi komunitas nasional tetapi komunitas regional.⁴⁷ Keinginan ASEAN untuk menciptakan identitas regional telah dituangkan dalam dokumen *ASEAN Vision 2020* yang dideklarasikan di Kuala Lumpur tahun 1997. Dokumen itu antara lain menyebutkan: "*We envision the entire Southeast Asia to be, by 2020, an ASEAN Community conscious of the ties of history, aware of its cultural heritage and bound by common regional identity*".⁴⁸

Ke depan, pembentukan komunitas ASEAN akan menjadi perekat di antara rakyat ASEAN dan yang terpenting adalah terciptanya rasa memiliki di antara rakyat ASEAN tentang ASEAN. Sebab proses menuju Masyarakat ASEAN akan ditandai oleh semakin meningkatnya interaksi dan pengetahuan tentang ASEAN yang dengan sendirinya akan berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepercayaan antar-warga di kawasan, dan karenanya pula akan membantu mempercepat pembentukan identitas kawasan. Dengan kata lain, pembentukan identitas kawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi harus didukung oleh hubungan antar-warga yang saling mengenal. Bersamaan dengan meningkatnya hubungan antar-warga, untuk jangka panjang, besar kemungkinan doktrin non-intervensi akan menjadi tidak relevan lagi ketika ASEAN telah benar-benar menjadi sebuah Masyarakat ASEAN.⁴⁹ Pada saat itu ASEAN sudah harus mempunyai modalitas, kapasitas dan pemahaman bersama tentang berbagai isu yang berkembang di masyarakat dengan didukung oleh organisasi yang lebih efektif, tidak hanya dalam menghadapi masalah strategis di masa depan tetapi juga dalam menghadapi masalah-masalah domestik.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Michael E. Jones, "Forging an ASEAN Identity: The Challenge to Construct a Share Destiny", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 26, No. 1, 2004, hal. 141.

⁴⁹ Bantarto Bandoro, "ASEAN Moves Toward Modern Organization", *The Indonesia Quarterly*, Vol 36, No. 5, 2007, hal. 204.

Berbagai konflik atau sengketa yang terjadi di kawasan seperti konflik kepentingan antara Indonesia dengan Malaysia tentang TKI, antara Kamboja dengan Thailand, antara Indonesia-Malaysia di Laut Ambalat merupakan contoh yang memperlihatkan bagaimana rakyat ASEAN belum terlalu menyatu dalam satu ikatan kawasan. Ketika media dan pengambil keputusan di negara-negara ASEAN bersikap negatif terhadap warga dan pemerintah ASEAN lainnya, maka warga di negara yang sedang bersengketa itu dengan mudah menjadi terpengaruh. Untuk membangun saling percaya antar-warga di kawasan, maka pemerintah dan media sedapat mungkin mengambil sikap yang lebih bersahabat agar transisi ASEAN menuju sebuah komunitas dapat berjalan dengan kondusif.⁵⁰ Masalah lemahnya saling percaya diantara warga ASEAN saat ini dibenarkan oleh Ketua Kadin Batam. Menurutnya, untuk memajukan hubungan antar-warga di ASEAN, yang pertama kali harus dilakukan adalah meningkatkan saling percaya. Menurutnya, ASEAN bisa menjadi besar jika para pemimpin ASEAN mempersiapkan segala sesuatunya tanpa rasa curiga.⁵¹ Piagam ASEAN seharusnya diimplementasikan atas dasar *Trust Based on Culture and Relationships*.

Karena itu dalam upaya membentuk *community building* ini, ASEAN bukan hanya harus mampu memberi ruang bagi terciptanya hubungan yang harmonis di antara warganya tetapi juga antara pemerintah dengan warganya.⁵² Semakin terintegrasinya hubungan diantara pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi ini akan menghilangkan rasa curiga tersebut dan semakin mempercepat proses pembentukan identitas kawasan. Apalagi jika rakyat di Asia Tenggara berinteraksi secara intensif menjadi sebuah proses pembentukan rasa kebersamaan dan rasa memiliki, maka identitas kawasan ini akan semakin cepat terbentuk.⁵³ Menempatkan hubungan antar-warga pada prioritas kerjasama ASEAN merupakan pilihan yang paling rasional dewasa ini jika memperhatikan perkembangan dunia internasional dewasa ini yang semakin terkotak-kotak dalam berbagai organisasi kerjasama regional.

Para informan yang berada di Pulau Batam sepakat bahwa langkah yang paling cepat untuk memajukan hubungan antar-warga dalam rangka

⁵⁰ Christopher B. Robert, *op.cit*.

⁵¹ Wawancara di Batam, 5 November 2009.

⁵² Lihat, Rizal Sukma, "Building the ASEAN Community, How Useful Is the Asean Charter", dalam *The Indonesia Quarterly*, Vol. 36, No. 3-4, 2008, hal. 268-269.

⁵³ *Ibid*.

membentuk Masyarakat ASEAN adalah dengan meningkatkan hubungan antar-warga di perbatasan.⁵⁴ Hal ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah Indonesia untuk menggalakkan pembangunan industri di pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan guna mendukung penyebaran industri nasional.⁵⁵ Di bidang ekonomi, pengusaha-pengusaha di Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan inisiatif-inisiatif dalam kerangka peningkatan perdagangan antara provinsi itu dengan Singapura dan Johor. Upaya ini dilakukan dengan menjual produk-produk tertentu yang menjadi andalan Kepulauan Riau. Dalam kerangka memajukan hubungan antar-warga di sektor perdagangan intra ASEAN, para informan tersebut mengusulkan agar pemerintah lebih banyak memberi kesempatan kepada pengusaha kecil dan menengah. Dengan melibatkan pengusaha kecil dan menengah, akan lebih banyak lagi pengusaha yang terlibat dalam perdagangan. Di samping itu, produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha UKM sangat bernuansa tradisional sehingga pembeli dapat langsung mengenal negara asal produk tersebut seperti batik ditukar dengan kain tenun dari Filipina atau Thailand.

Hubungan yang bersifat personal juga dilakukan antara individu di Kepulauan Riau dengan masyarakat di Johor atau Selangor atau wilayah Malaysia di sekitar perbatasan. Hubungan ini tidak terlepas dari hubungan tradisional yang selama ini memang sudah terbangun. Seperti adanya forum "dunia islam dunia malaya" yang melibatkan para pemuda dan tokoh masyarakat yang membahas masalah-masalah sosial dan budaya. Pertemuan ini bersifat kekeluargaan agar tali persaudaraan yang telah ada secara turun temurun tidak terputus begitu saja. Karena hubungan kekeluargaan ini pula, banyak orang Kepulauan Riau yang berobat di Malaysia atau Singapura dengan mendapat pelayanan yang sangat baik.⁵⁶

Namun apa yang telah dilakukan dan dirintis oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau merupakan kegiatan tradisional yang dilakukan karena faktor kesamaan kultural. Artinya baik pemerintah daerah maupun warga belum pernah melakukan kegiatan atau inisiatif diluar kegiatan tradisional. Ke depan, para informan mengharapkan agar semuanya itu bisa dilakukan secara formal atas dasar keinginan politik ASEAN untuk meningkatkan hubungan antar-warga di

⁵⁴ Hasil wawancara terpisah dengan Yusfa Hendry, Kabag Humas Pemko Batam, tanggal 3 November 2009, Nada Faza Soraya, Ketua Kadin Batam, 5 November 2009, dan Ir. Soeripno, Kepala Bappeda Kepri, di Tanjung Pinang, 2 November 2010.

⁵⁵ "Industri di Pulau Terluar Digalakkan", *Media Indonesia*, 19 Juli 2010, hal. 14.

⁵⁶ Penjelasan dari Ir. Sunipno, Kepala Bappeda Kepri, di Tanjung Balai, 2 November 2009.

kawasan Asia Tenggara sehingga tidak hanya Singapura dan Malaysia saja yang tahu tentang Batam tetapi juga semua negara anggota ASEAN. Seperti dibidang perdagangan, pemerintah sudah waktunya melibatkan pengusaha dalam membicarakan MoU yang hendak ditandatangani didalam ASEAN agar pengusaha memperoleh informasi secara langsung. Pengalaman selama ini menunjukkan antara kebijakan dengan realisasi seringkali tidak sinkron sehingga pengusaha di Batam seringkali kesulitan untuk melakukan kegiatan bisnis.

Untuk menjembatani keterbatasan pemerintah dalam melibatkan pengusaha dalam meningkatkan hubungan antar-warga, pada tahun 2007 Kadin Batam pernah berinisiatif mendatangi Kedubes negara-negara ASEAN agar pengusahanya mau ikut dalam Batam Expo. Tujuannya adalah agar pembangunan dan perdagangan di Batam menjadi lebih maju. Dengan pendekatan semacam ini semua negara anggota ASEAN ikut dalam pameran tersebut. Kadin memfasilitasi semua kegiatan itu. Langkah terobosan ini berhasil meskipun untuk itu Kadin Batam harus ijin dahulu ke pusat. Banyak inisiatif yang ingin dilakukan Kadin Batam untuk memajukan perdagangan intra ASEAN tetapi masih banyak informasi yang belum dikeluarkan oleh pemerintah.⁵⁷ Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah sudah waktunya segera menerapkan kebijakan *bottom up* agar cita-cita membangun masyarakat ASEAN benar-benar menjadi kenyataan. Ini sekaligus untuk menjawab keluhan dari berbagai LSM yang menyatakan Piagam ASEAN belum memberikan ruang bagi interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya, Piagam masih lebih mengutamakan hubungan antar-pemerintah.⁵⁸ Apa yang telah dilakukan oleh Kadin Batam maupun masyarakat Kepulauan Riau secara keseluruhan menunjukkan bahwa hubungan antar warga bukanlah sesuatu yang baru, tinggal bagaimana pemerintah mengelola semuanya itu untuk kepentingan kerjasama ASEAN di masa depan

⁵⁷ Wawancara dengan Nada Faza Soraya, Ketua Kadin Batam, 5 November 2009.

⁵⁸ Salah satunya adalah dari Solidarity for Asian Peoples' Advocacies (SAPA), yang menyebutkan Piagam ASEAN masih belum mengutamakan *community building*. Untuk lengkapnya lihat, "Analysis of the ASEAN Charter", SAPA, 18 Nov 07, dalam <http://www.asiasapa.org>, diakses 18 Desember 2007

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Piagam yang dibentuk tahun 2008 telah memberikan identitas baru bagi ASEAN sebab bukan lagi menjadi organisasi yang hanya mengandalkan pada peran pemerintah (*state centric*) saja tetapi juga menjadikan hubungan antar-warga (*people oriented*) sebagai bagian dari pengembangan ASEAN ke depan. Perubahan semacam ini sangat dibutuhkan ASEAN mengingat permasalahan yang dihadapi dewasa ini bukan hanya domestik saja, tetapi juga internasional. Seiring dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi, kohesifitas ASEAN dituntut bukan hanya pada tataran hubungan antar-pemerintah saja tetapi juga dukungan melalui interaksi positif antar-warganya di berbagai kegiatan sektoral seperti ekonomi, politik dan keamanan, serta kebudayaan.

Terbentuknya Piagam ASEAN bukan saja akan menjadikan ASEAN lebih efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi akan tetapi juga akan membantu mempercepat proses pembentukan identitas kawasan. Meskipun didalam prosesnya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dan waktu yang tidak singkat, akan tetapi upaya itu tetap harus dilakukan agar keinginan untuk membentuk Masyarakat ASEAN tahun 2015 dapat tercapai. Apalagi Piagam ASEAN memuat secara jelas fungsi dan tanggung jawab setiap elemen dalam organisasi. Sekjen ASEAN kini telah memiliki kewenangan untuk mendesak setiap negara anggota mematuhi kesepakatan yang telah diambil.

Menjadikan hubungan antar-warga sebagai prioritas kerjasama merupakan pilihan yang paling rasional dewasa ini jika dikaitkan dengan kerjasama ASEAN ke depan. Sikap saling mengenal, saling percaya dan menyatu dalam satu ikatan kawasan, akan memberi ruang bagi terciptanya hubungan yang harmonis bukan hanya antar-warga tetapi juga antara pemerintah dengan warganya. Semakin terintegrasinya hubungan antar-warga maupun warga dengan pemerintah akan menghilangkan rasa curiga. Pada tahap awal, langkah yang paling cepat untuk memajukan hubungan antar-warga adalah dengan meningkatkan hubungan antar-warga di perbatasan, sebab secara tradisional hubungan di antara mereka telah lama terbina.

2. Saran

Salah satu kelemahan ASEAN selama ini adalah tidak adanya mekanisme yang dapat memaksa setiap negara anggota untuk mematuhi kesepakatan yang telah tercapai. Formula "X-1" kemudian digunakan untuk memberi kesempatan kepada negara yang belum mampu mengimplementasikan keputusan ASEAN untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sampai akhirnya benar-benar siap untuk mengimplementasikan keputusan ASEAN. Pendekatan semacam ini membuat keputusan yang diambil ASEAN tidak pernah bulat.

Untuk mengatasi kelemahan semacam ini Piagam ASEAN kemudian memberikan tugas kepada Sekjen ASEAN untuk memonitor kepatuhan negara-negara dalam mengimplementasikan keputusan ASEAN. Namun mengingat masih beragamnya tingkat kemajuan ekonomi dan politik negara-negara anggota ASEAN, ada baiknya jika tugas ini diserahkan kepada sebuah Badan Khusus yang anggotanya berasal dari negara-negara ASEAN. Hasil monitoring dari Badan Khusus ini yang kemudian diserahkan kepada Sekjen untuk dilaksanakan. Pola atau pendekatan semacam ini perlu dilakukan agar keputusan yang diambil bisa lebih obyektif sesuai dengan tingkat kemampuan negara-negara anggota.

Di samping itu, ASEAN juga harus mengembangkan sistem informasi yang lebih dapat diandalkan agar segala informasi yang terkait dengan organisasi dan kegiatannya dapat lebih mudah diketahui oleh masyarakat. Kerjasama ASEAN tidak boleh lagi bersifat seremonial sehingga tidak berdampak samasekali terhadap masyarakatnya. Apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat harus dapat diimplementasikan oleh bawahannya sampai ke tingkat provinsi. Sistem informasi ini menjadi penting agar antara kebijakan dengan realisasi menjadi sinkron sehingga pengusaha atau pelaku bisnis mempunyai kepastian untuk melakukan kegiatan bisnis.

Konsisten dengan bentuk organisasi ASEAN yang bersifat "*people oriented*", sudah waktunya pula bagi pemerintah untuk melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam membicarakan MoU yang hendak ditandatangani di dalam ASEAN. Terutama untuk bidang ekonomi, para pengusaha atau pelaku bisnis sudah saatnya untuk diajak bicara agar Indonesia yang merupakan negara paling padat penduduknya tidak menjadi pasar dalam perdagangan bebas ASEAN.

Daftar Pustaka

Buku:

- Brian Job, "Track II Diplomacy: Ideational Contribution to the Evolving Asia Security Order", dalam Muthiah Alagappa (ed), *Asia Security Order*, Stanford University Press, 2002.
- Carolina Hernandez, sebagaimana di kutip dalam CSIS, "An ASEAN, of the People, by the People, for the People", *Report of the First ASEAN's People Assembly*, Batam, Indonesia, 24-26 November 2000.
- Donald K. Emmerson, *Hard Choices: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia*, ISEAS, Singapura, 2009.
- James Luhulima, *Asia Tenggara dan Negara Luar yang Mempengaruhinya: Pendekatan Politik dan Keamanan*, PT Gramedia, 1998.
- Jesus P. Estanislao, "Internal Dynamics of One Southeast Asia: Economic and Social Aspects", dalam Hadi Soesastro (ed.), *One Southeast Asia In a New Regional and International Setting*, CSIS, Jakarta, 1997.
- Leo Suryadinata, "Toward An ASEAN Charter: Promoting an Asean Identity", dalam Rudolphi C. Severino (ed.), *Framing the ASEAN Charter: An ISEAS Perspective*, ISEAS, Singapura, 2005.
- Liao Shaolian, "ASEAN Model in International Economic Cooperation", hal. 151, dalam dalam Hadi Soesastro (ed.), *One Southeast Asia In a New Regional and International Setting*, CSIS, Jakarta, 1997.
- Louise Diamond, *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*, Third Edition, Kumarian Press, West Hartford, Connecticut, 1996.
- Marlene Ramirez, "ASIADHRA and ASEAN: A Case Study on the Process of Civil Society Engagement with a Regional Intergovernmental Organization", FIM Forum 2008, Montreal, Kanada.
- M. Rajaretnam, "Principles in Crisis: The Need for New Directions", dalam Kao Him Hourn, ed, *ASEAN's Non-Interference Policy: Principle Under Pressure*, ASEAN Academic Press, London, 2002.
- Rodolfo Severino, "Framing the ASEAN Charter: An ISEAS Perspective", dalam Rodolfo Severino (ed.), *Framing The ASEAN Charter: An ISEAS Perspective*, ISEAS Publications, Singapura, 2005.

Jurnal:

- Alexander C. Chandra, "Indonesia's Non-State Actors in ASEAN: A New Regionalism Agenda for Southeast Asia, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 26, No. 1, 2004.
- Bantarto Bandoro, "ASEAN Moves Toward Modern Organization", *The Indonesia Quarterly*, Vol 36, No. 5, 2007.
- Christopher B. Robert, "The ASEAN Community: Trusting Thy Neighbour", *RSIS Commentaries*, No. 110, 22 Oktober 2007.
- Dalia Dassa Kaye, "Rethinking Track Two Diplomacy: The Middle East and South Asia", *Clingendael Diplomacy Papers*, No. 3, Netherland Institute of International Relations, Juni 2005.
- Elena Asciutti, "The ASEAN Charter: An Analysis", *Perspectives on Federalism*, Vol. 2, Issue 1, 2010.
- Gillian Goh, "The ASEAN Way: Non Intervention and ASEAN Role in Conflict Management", *Stanford Journal of East Asian Affairs*, Vol. 3, No. 1, Spring 2003.
- Hadi Soesastro, ASEAN: Regional Economic Cooperation and Its Institutionalization, *Working Paper Series*, No 71, CSIS, Jakarta, 2003.
- Herman Joseph S. Kraft, A Charter for ASEAN: Challenges and Prospects for Community Building", *Indonesia Quarterly*, Vol. 36, No. 3-4, 2008.
- Mely Caballero-Anthony, "The ASEAN Charter: An Opportunity Missed or One That Cannot be Missed?", *Southeast Asian Affairs 2008*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2008.
- Michael E. Jones, "Forging an ASEAN Identity: The Challenge to Construct a Share Destiny", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 26, No. 1, 2004.
- Rizal Sukma, "Building the ASEAN Community, How Useful Is the Asean Charter, dalam *The Indonesia Quarterly*, Vol. 36, No. 3-4, 2008.
- See Seng Tan, "Non-official Diplomacy in Southeast Asia: "Civil Society" or "Civil Service", *Contemporary Southeast Asia* 27, no. 3, 2005.
- Termsak Chalermpanupap, "Institutional Reform: One Charter, Three Communities, Many Challenges", dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Hard Choices: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia*, ISEAS Publishing, Singapura, 2009.
- "Understanding the ASEAN Charter and the ASEAN Economic Blueprint", *AFA and Asiadharra Issue Paper*, Vol. 3, No. 1, Februari 2008.

Surat Kabar:

- "Industri di Pulau Terluar Digalakkan", *Media Indonesia*, 19 Juli 2010, hal. 14.
- Jusuf Wanandi, "The ASEAN Summit and Indonesia's National Interest", dalam *The Jakarta Post*, 19 Maret 2009.
- Keith B. Richburg, "The Changing Calculus of Asia", dalam *International Herald Tribune*, 17 Desember 1997.
- Rene L. Pattiradjawane, "Membangun ASEAN Baru", *Kompas*, 15 Juni 2010.
- "RI Sesalkan Aksi Sweeping", *Kompas*, 11 September 2009.
- Tommy Koh, "ASEAN Charter at One: A Thriving Tiger Pup", *The Straits Times*, 09 Desember 2009.

Internet (produk individual):

- Ali Alatas, "Piagam ASEAN Kebutuhan Mencapai Integrasi, *Tabloid Diplomasi*, edisi April 2008 dalam <http://tabloiddiplomasi.com/>, diakses 29 Januari 2010.
- John McLean, Will ASEAN's New Charter Bring Greater Cooperation?, dalam <http://www.DevelopmentAsia.mht>, diakses 24 April 2010.
- Kim Beng Phar, Asia's Informal Diplomacy: Track Two Discussion and Regionalism", *Media*, Vol. 23, No. 1, Spring 2001 dalam <http://www.harvardir.org/articles/998/>, diakses 12 Oktober 2009
- Ong Keng Yong, "What's the Difference Between ASEAN Past and Present", makalah yang disajikan dalam *2nd ASEAN-Asia Forum* yang diselenggarakan oleh Singapore Institute of International Affair, Singapura, 17 April 2009, dalam <http://www.siaaonline.org/?q=events/2nd-asean-and-asia-forum>, diakses 26 Mei 2010.
- Pokpon Lawansiri, "ASEAN: People-oriented or disoriented?", *Inquirer.net*, 29 November 2009, diakses tanggal 29 Januari 2010.

Internet (produk non individual):

- "Analysis of the ASEAN Charter", SAPA, 18 Nov 07, dalam <http://www.asiasapa.org>, diakses 18 Desember 2007.

Makalah:

"Masalah Kegunaan dan Masa depan ASEAN Charter", CSIS, makalah yang disajikan dihadapan Komisi I DPRRI, Jakarta, 4 Februari 2008.

Informan Utama:

Yusfa Hendry, Kepala Bagian Humas Pemko Batam.

Nada Faza Soraya, Ketua Kadin Batam.

Ir. Soeripno, Kepala Bappeda Kepri.